

Proses Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka

Oleh: Nur Azisyah Mukmin¹, Asrani²

Sosiologi, Universitas Halu Oleo

lisamukmin24@uho.ac.id, asrani@uho.ac.id

Abstrak

Studi ini membahas proses pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Yayasan Bahari. Minimnya pengetahuan, keterampilan dan menurunnya pendapatan masyarakat akibat limbah perusahaan dan ketergantungan pada potensi sumber daya alam laut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan proses pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, subyek penelitian ditentukan secara *purposive*, yakni aktor pemberdaya yang meliputi: Yayasan Bahari, Pemerintah Setempat dan Kelompok Nelayan. Teknik pengumpulan data: Wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Yayasan Bahari meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya kelompok nelayan dan membuka akses terhadap peningkatan ekonomi lokal. Kesimpulan penelitian proses pemberdayaan masyarakat pesisir membutuhkan kolaborasi Pemerintah, Perusahaan, Yayasan Bahari dan Komunitas Manusia Perahu dalam program pemberdayaan masyarakat yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat Pesisir, Manusia Perahu

Abstract

This study discusses the process of empowering coastal communities through the Maritime Foundation. Lack of knowledge, skills and declining community income due to company waste and dependence on potential marine natural resources. The purpose of this writing is to explain the process of empowering coastal communities in Dawi-dawi Village, Pomalaa District, Kolaka Regency. This research uses a qualitative descriptive approach, the research subjects are determined *purposively*, namely empowering actors which include: Marine Foundation, Local Government and Fishermen's Groups. Data collection techniques: In-depth interviews, observations and documentation. The results of the study show that the community empowerment process initiated by the Bahari Foundation increases community participation, especially fishermen's groups, and opens access to local economic improvement. The conclusion of the research on the coastal community empowerment process requires the collaboration of the Government, Companies, Marine Foundations and the Boat Man Community in a more optimal and sustainable community empowerment program.

Key Word: *Community Empowering, Coastal People, Boat Man*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu paradigma dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowering, and sustainable* ((Soetomo, 2011); Sukmana, 2021). Pembangunan berbasis masyarakat adalah suatu proses pemberdayaan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan nilai-nilai sosial budaya. Pemberdayaan masyarakat berangkat dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat secara partisipatif. Oleh karenanya proses pemberian daya harus menempatkan mereka sebagai subjek atau aktor dan bukan sebagai obyek pembangunan (Amalia & Syawie, 2015).

Tujuan dari pemberdayaan adalah merujuk pada keadaan, hasil akhir yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bertumpu pada kekuatan, kekuasaan, pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, meningkatnya kepercayaan diri, mampu menyampaikan inspirasi, memiliki mata pencaharian dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial (Ife, 1995; Qonaah, 2018; Soleh, 2014; Sukmana, 2022). Proses pemberdayaan merupakan proses mewujudkan *self-sustaining capacity* masyarakat itu sendiri, menuju pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu keterbelakangan (Mukmin, 2021).

Kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir Kelurahan Dawi-dawi, mengalami penurunan yang mempengaruhi pendapatan, kesempatan kerja, kepercayaan diri dan partisipasi. Mata pencaharian masyarakat 55% sebagai nelayan, artinya lebih dari setengah penduduk bergantung pada hasil laut. Diketahui, hasil tangkapan ikan masyarakat pesisir sekali melaut mencapai 30-40 tusuk ikan. Namun saat ini masyarakat hanya memperoleh 1-2 tusuk ikan perharinya (Mukmin, 2021). Kondisi ini mengakibatkan banyak masyarakat terpaksa beralih profesi dari nelayan menjadi buruh kasar karena kurangnya pengetahuan terhadap akses pelatihan penangkapan ikan, pemasaran dan pengelolaan keuangan. Yayasan Bahari merupakan organisasi *non-profit* memiliki tujuan untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pengelolaan sumber daya hayati pesisir, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Hubungan kemitraan saling menunjang dan menguntungkan bagi pelaku usaha dalam rangka memperkuat struktur ekonomi, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam program-program pemberdayaan (Tampubolon, 2012; Yulianta & Rahmat, 2021). Agar proses pemberdayaan masyarakat pesisir dapat berjalan efektif dan optimal dibutuhkan fasilitator yang dapat menjembatani masyarakat terhadap akses pembuatan usaha, pengelolaan keuangan dan pemasaran

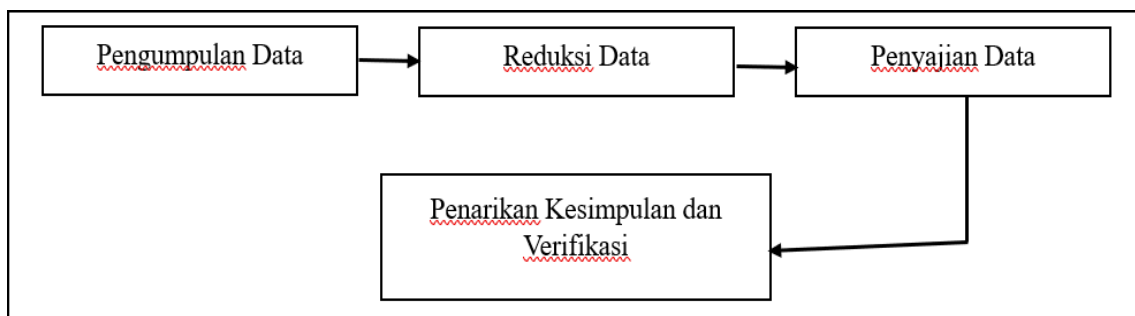
sehingga masyarakat pesisir tidak lagi bergantung pada kondisi alam. Yayasan Bahari sebagai organisasi lokal berperan penting bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan proses pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Yayasan Bahari di Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

METODE

Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami proses pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Yayasan Bahari. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Penentuan informan penelitian secara *purposive* (Silalahi, 2012). Dalam hal ini dipilih orang yang memiliki *power* dan otoritas maka informan dalam penelitian ini ialah yayasan bahari, pemerintah setempat dan kelompok nelayan Kelurahan Dawi- dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dan dokumentasi untuk memahami secara faktual proses pemberdayaan masyarakat pesisir. Analisis data dilakukan secara terus-menerus hingga tuntas dan akan berakhir pada saat data tersebut sudah jenuh (Moleong & Surjaman, 2014). Aktivitas analisis data yang dimaksud dijelaskan dalam gambar:

Bagan 1: Aktivitas Analisis Data



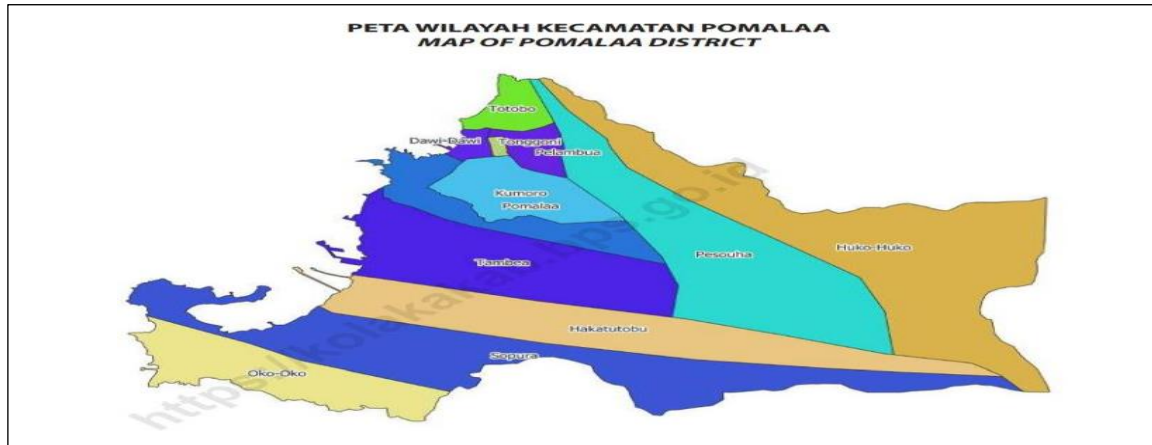
PEMBAHASAN

Gambaran Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dengan luas wilayah 1.01 km² peruntukan terluas adalah permukiman. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tonggoni, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pomalaa, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kumoro. Jumlah penduduk di Kelurahan Dawi-dawi sebanyak 9.235 jiwa, terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4715 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak

4520 jiwa (Kecamatan Pomalaa dalam Angka, 2024). Berikut peta wilayah Kelurahan Dawi-dawi:

Gambar 1: Peta Wilayah Kelurahan Dawi-dawi



Sumber: Kecamatan Pomalaa dalam Angka BPS (2024)

Berdasarkan pengamatan lapangan, Kelurahan Dawi-dawi dipadati penduduk yang bermukim di daratan dan pesisir dengan mata pencaharian diantaranya pedagang, karyawan swasta, petani dan nelayan. Disajikan dalam tabel persentase berikut:

Tabel 1: Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Dawi-dawi

No	Mata Pencaharian	Jumlah (%)
1	Pedagang	25
2	Karyawan Swasta	10
3	Petani	10
4	Nelayan	55

Sumber: Laporan Pemerhati Kemanusiaan Peduli Umat (2020)

Proses pemberdayaan merupakan proses mewujudkan *self-sustaining capacity* masyarakat itu sendiri, menuju pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu keterbelakangan (Mukmin, 2021).

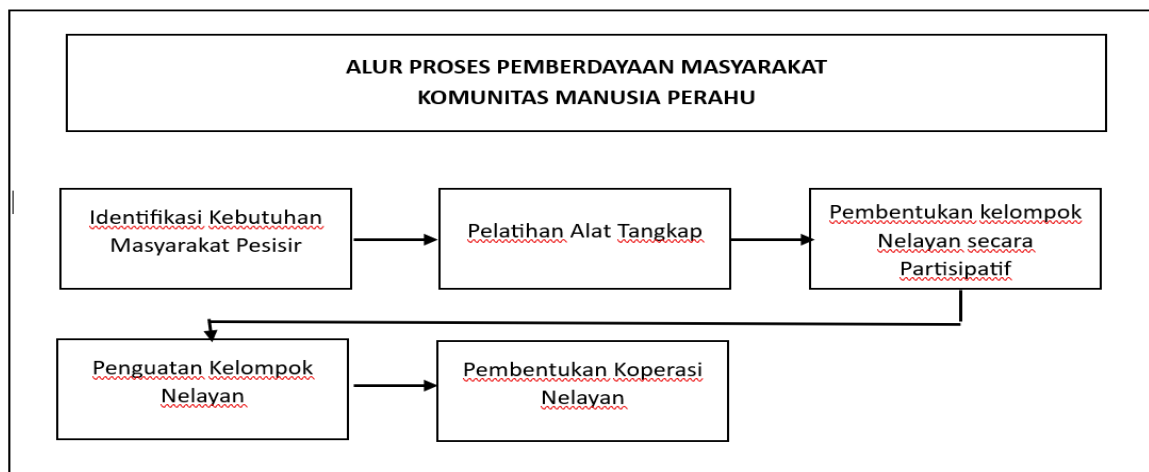
Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Yayasan Bahari

Pelaksanaan pemberdayaan pada masyarakat lokal termanifestasi dalam bentuk berbagai tindakan kolektif dengan tujuan melakukan perubahan kondisi kehidupannya. Institusi lokal berfungsi untuk memfasilitasi tindakan bersama yang sudah terpolo, sehingga fungsinya bukan

semata-mata sebagai suatu organisasi melainkan juga merupakan pranata sosial. Lebih lanjut dijelaskan Soetomo (2011) fungsi institusi lokal sebagai instrumen pemberdayaan akan memfasilitasi kapasitas masyarakat dalam proses pengelolaan program pemberdayaan sebagai sarana pengambilan keputusan. Dalam hal ini, institusi lokal merupakan bagian dari sektor sukarela yang berfungsi sebagai struktur mediasi yang dapat menjembatani hubungan dengan sektor privat dan publik. Keberhasilanyapun dapat diukur melalui beberapa indikator yakni, terstruktur, terpecahnya suatu permasalahan dan adanya rasa aman dan rasa keikutsertaan bagi anggota masyarakat serta sifatnya jangka panjang atau berkelanjutan (Syafa'at *et al.*, 2003)

Yayasan Bahari (Yari) dibentuk sejak tanggal 23 Juli 2001, beranggotakan 6 (enam) orang dari Fakultas Perikanan di beberapa Universitas ternama Indonesia. Yayasan Bahari merupakan organisasi *non-profit* memiliki tujuan untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pengelolaan sumber daya hayati pesisir dan hutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Yari memiliki visi memberdayakan masyarakat pesisir secara berkelanjutan khususnya daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, memiliki misi menghasilkan data potensi, kondisi sumberdaya hayati pesisir dan lautan; melakukan kegiatan konservasi dan pelestarian sumber daya hayati pesisir dan lautan; serta mendorong peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Bagan 2: Alur Proses Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Manusia Perahu



Sumber: Olah Data Peneliti, 2025.

Berikut disajikan alur proses pemberdayaan masyarakat pesisir (komunitas manusia perahu) di Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

a. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Pesisir

Identifikasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakat dengan cara memprioritaskan masyarakat lapisan bawah agar dapat hidup layak sesuai harkat dan

martabatnya sebagai manusia, paling tidak dalam rangka kebutuhan dasarnya (Soetomo, 2011). Dalam proses identifikasi ditemukan bahwa masyarakat membutuhkan akses pelatihan, penguatan kelompok, pengelolaan keuangan dan pemasaran. Yayasan bahari juga ingin memecahkan persoalan yang telah lama berakar dalam kehidupan nelayan. Berdasarkan wawancara dengan direktur yayasan bahari, Bapak AR mengungkapkan:

Kita ingin memecahkan dua persoalan, yang pertama meningkatkan nilai pendapatan nelayan dan kedua ekosistem yang sudah rusak kita coba perbaiki supaya punya nilai manfaat untuk masyarakat pesisir utamanya nelayan. Jadi ekosistem terumbu karang yang ada di Pomalaa itu mulai dari ujung pesisir yang berdampak merah sampai ke ujung sudah rusak (sedimen), tapi yang daerah lebih ke dalam lagi lautnya masih ada potensi sampai di daerah Padamarang TWAL (Taman Wisata Alam Laut) yang dikelola BKSDA (Balai konservasi sumber daya alam) (Hasil wawancara, 2025).

Yayasan Bahari sejak tahun 2017 hingga saat ini melaksanakan pemberdayaan pada kelompok nelayan. Tentunya dengan beberapa tahap dimulai dan pendekatan kepada masyarakat, identifikasi kebutuhan hingga melaksanakan pelatihan, salah satunya pelatihan alat tangkap.

b. Pelatihan Alat Tangkap

Pelatihan alat tangkap dilakukan dengan pertimbangan minimnya nelayan yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Jika kebiasaan tersebut dan pola pikir masyarakat tidak arahkan untuk memelihara sumber daya alam akibatnya dapat merusak ekosistem laut, berikut wawancara dengan pihak Yayasan Bahari:

Pelatihan alat tangkap ramah lingkungan, misalnya pancing, bubu, tombak (panah ikan), jaring ukuran standar sehingga tidak merusak, jadi ikan-ikan besar saja yang ditangkap, ikan kecil masuk ke bubu. Namun, mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat itu butuh waktu yang lama yang kita lakukan dengan metode pendekatan. Sehingga mereka yang pola pikirnya dulu harus melakukan bom, karena satu kali membom hasilnya besar tapi untuk beberapa tahun kedepan akan melarat itulah yang kita lakukan penguatan kepada masyarakat sampai saat ini tinggal 1-2 % yang pemikirannya seperti dulu (Hasil Wawancara, 2025).

Didampingi yayasan bahari dengan bantuan mesin kapal memudahkan nelayan menjangkau sumber daya laut sehingga nelayan tidak kesulitan untuk menjangkau area operasi. Menurut Zimmerman (2000) proses pemberdayaan diarahkan kepada tiga aspek, yaitu: peningkatan kemampuan masyarakat dalam akses terhadap sumberdaya (*aces to resources*), terbukanya struktur pemerintahan (*open government structure*), dan toleransi terhadap keberagaman (*tolerance for diversity*).

c. Pembentukan dan Penguatan Kelompok

Kelurahan Dawi-dawi memiliki 3 (tiga) kelompok, yakni: kelompok nelayan bahari (perwakilan nelayan makassar), kelompok nelayan lintas samudera (perwakilan nelayan bugis) dan kelompok nelayan sitabangang (perwakilan nelayan bajo). Berdasarkan penjelasan salah ketua kelompok nelayan Bahari:

Saya salah satu ketua kelompok nelayan yang dipilih masyarakat secara partisipatif. Saya membawahi beberapa koordinator seperti nelayan pukat, pancing, rumpon, bubu, cumi kepiting dan lain-lain. Jadi tidak semua nelayan itu satu profesi, ada nelayan pancing atau bubu saja profesinya, ada budidaya taripang, juga istri-istri nelayan (papalele), semuanya ada di SK nelayan (Hasil Wawancara, 2025).

Selain pembentukan kelompok, juga dilakukan penguatan kelompok nelayan yang dilegalkan dalam bentuk SK (surat keputusan) oleh pemerintah setempat didampingi Yayasan Bahari. Berikut dokumentasi pada saat pembuatan SK:

Gambar 2: Penguatan Kelompok Nelayan



Sumber: Laporan Yayasan Bahari (2020).

Penguatan kelompok seperti yang dilampirkan pada gambar diatas bertujuan untuk melegalkan kelompok nelayan yang sudah dibentuk agar tidak ada lagi oknum yang memecah kelompok secara sepihak. Oleh karena pemberdayaan masyarakat pesisir diharapkan dapat berkelanjutan maka perlu akses untuk budidaya, pengelolaan keuangan dan pemasaran.

d. Pembentukan Koperasi Nelayan

Yayasan Bahari Yayasan bahari sebagai fasilitator membentuk pengurus koperasi dari masing- masing kelompok nelayan. Koperasi tersebut dibentuk dan berjalan sejak oktober 2019. Berdasarkan data lapangan diketahui pada saat menjelang imlek harga lobster meningkat mencapai 1.000.000-1.500.000/kg. Hal ini menjadi peluang bagi nelayan sebab ketika menjelang imlek, nelayan berhadapan dengan musim pancaroba atau musim peralihan antara

musim angin barat ke musim angin timur begitupun sebaliknya, sehingga nelayan tidak dapat melaut. Namun saat ini, koperasi yang telah dibentuk tidak lagi beroperasi.

Terdapat empat akses dalam pemberdayaan masyarakat pesisir (Satria, 2015) diantaranya: a. Akses terhadap sumber daya alam, ialah kemampuan masyarakat pesisir baik individu maupun kelompok untuk dapat memanfaatkan sumberdaya pesisir, perikanan dan kelautan. b. Akses terhadap partisipasi, artinya bahwa masyarakat pesisir mendapatkan partisipasi mulai dari informasi, input proses sampai output dan outcome hasil dari partisipasi secara merata dan adil. c. Akses terhadap pasar, artinya masyarakat pesisir yang sebagian besar adalah nelayan mampu menjual hasil tangkapannya. d. Akses terhadap informasi dan pengetahuan, meliputi ilmu pengetahuan tentang teknik dan cara penangkapan yang ramah lingkungan, program bantuan dan pemberdayaan serta akses mendapatkan bahan bakar untuk keperluan melaut.

PENUTUP

Yayasan Bahari merupakan organisasi sosial yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat pesisir di Provinsi Sulawesi Tenggara. Melakukan perannya sebagai aktor pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Dalam hal ini Yayasan Bahari memiliki peran sebagai inisiator (melakukan inisiasi), motivator (memberikan motivasi), dan fasilitator (melakukan fasilitasi). Tentunya dalam proses pemberdayaan masyarakat komunitas manusia perahu terdapat beberapa tahapan, meliputi: Identifikasi kebutuhan masyarakat pesisir, pelatihan alat tangkap, pembentukan kelompok nelayan secara partisipatif, penguatan kelompok dan pembentukan koperasi nelayan. Disarankan agar Pemerintah, Perusahaan, Yayasan Bahari serta Kelompok Nelayan melakukan kolaborasi dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir sehingga lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. D., & Syawie, M. (2015). Pembangunan Kemandirian Desa melalui konsep pemberdayaan: Suatu Kajian dalam perspektif sosiologi. *Sosio Informa*, 1(2), 175-188.
- Bahari, Y. (2020). *Laporan Yayasan Bahari 2020*. Yayasan Bahari.
- BPS. (2024). *Kecamatan Pomalaa Dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka
- Ife, J. W. (1995). *Community development: Creating community alternatives- vision, analysis and practice*. Longman.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Mukmin, N. A. (2021). Coastal Community Empowerment Strategy through PT. Antam (Persero) Tbk UBPN Southeast Sulawesi's CSR Program. *Indonesian Journal of Innovation and Applied Sciences (IJIAS)*, 1(1), 31- 39.
- Qonaah, S. (2018). Implementasi Corporate Social Responsibility PT PLN Distribusi Jawa Tengah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Lingkungan Melalui Program "PLN PEDULI,". *Jurnal Komunikasi*, 9(1), 46-52.
- Satria, A. (2015). *Pengantar sosiologi masyarakat pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Silalahi, U. (2012). *Metode penelitian Sosial, cet. Ke-3*. Refika Aditama. Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Soleh, C. (2014). *Dialektika pembangunan dengan pemberdayaan*. Fokusmedia.
- Sukmana, O. (2022). Literasi dan Peran Aktor Pemberdaya Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas di Kampung Wolulas, Malang. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(1), 291-305.
- Syafa'at, N., Simatupang, P., Mardianto, S., & Pranadji, T. (2003). Konsep pengembangan wilayah berbasis agribisnis dalam rangka pemberdayaan petani. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 21(1), 26-43.
- Umat, P. K. P. (2020). *Laporan Tabunan Kemanusiaan 2020*. Pemerhati Kemanusiaan Peduli Umat.
- Tampubolon, D. (2012). Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Sorot*, 8(2), 153-161.
- Yuliarta, I. W., & Rahmat, H. K. (2021). Peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis teknologi sebagai upaya memperkuat keamanan maritim di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 180-189.